



2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



Inspektorat Kota Magelang



Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2
Magelang 56101



(0293) 363646



inspektoratmgkota@yahoo.com

PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah limpahan rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Magelang Tahun 2016 telah berhasil disusun sebagai tindak lanjut tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kota Magelang yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Magelang Tahun 2016-2021. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran nyata mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran nyata mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan dan dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, disamping itu juga bisa diukur dari sisi efektifitas, efisiensi dan ekonomisnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Magelang ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja, sasaran, program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2016. Hal ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan keterbukaan dalam rangka mewujudkan Good Government/Governance yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Membangun sistem akuntabilitas kinerja sebagai bentuk akuntabilitas manajerial dan publik bukan semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban ketentuan perundang-undangan yang ada tetapi juga merupakan kebutuhan bagi organisasi Inspektorat Kota Magelang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Inspektorat Kota Magelang juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan dimasa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural maupun staf Inspektorat Kota Magelang dalam melaksanakan tugas fungsinya.

Kami menyadari dalam penyajian informasi LKjIP ini tentunya masih banyak kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

Magelang,
INSPEKTUR KOTA MAGELANG

Drs. DJATMO WAHYUDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19581115 198503 1 014

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Gambaran Umum Organisasi	3
D. Dasar Hukum	6
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Visi dan Misi	9
C. Tujuan dan Sasaran	11
D. Strategi dan Kebijakan	11
E. Sasaran Kinerja	17
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	20
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	21
C. Akuntabilitas Keuangan	27
BAB IV	
PENUTUP	30
A. Simpulan	30
B. Strategi Peningkatan Kinerja	30
LAMPIRAN	
1. Rencana Strategis Inspektorat Kota Magelang Tahun 2016 – 2021	
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2016	
3. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Kota Magelang ini adalah uraian terinci dari capaian kinerja sasaran Inspektorat, yang merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja secara menyeluruh, dan bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja, sebagaimana yang disyaratkan peraturan perundang-undangan.

Laporan yang disusun ini diharapkan merupakan salah satu alat observasi untuk melakukan introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat pimpinan. Oleh karenanya laporan ini diharapkan secara terus-menerus mendorong perbaikan proses manajemen Inspektorat Kota Magelang.

Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran Inspektorat, diharapkan dapat digambarkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, yang tentunya merupakan keberhasilan seluruh Perangkat Daerah, serta partisipasi masyarakat secara umum. Sedangkan kegagalan akan dijadikan bahan evaluasi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Pokok-pokok capaian kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2016, adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Sasaran:

Inspektorat Kota Magelang berupaya mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif”.

- Pencapaian target sasaran tersebut ditunjukkan dengan 21 indikator dengan capaian rata-rata 47,28%.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Magelang Tahun 2016, yang tentunya kedepan menjadi perhatian untuk penyempurnaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Magelang,
INSPEKTUR KOTA MAGELANG

Drs. DJATMO WAHYUDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19581115 198503 1 014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi yang diantaranya penyederhanaan prosedur birokrasi, kemudahan prosedur pelayanan publik dan transparansi informasi yang kesemuanya mengarah [ada system pelayanan masyarakat yang prima.

Dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terselenggaranya *good governance* merupakan syarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu pengejawantahan dari *good governance* bagi setiap instansi pemerintah adalah dengan cara membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada setiap akhir tahun anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai:

1. Sarana/instrument untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan fungsi- fungsi manajemen kinerja

- secara taat asas (konsisten);
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
 4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja;
 5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih merupakan amanat dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan prasyarat bagi terwujudnya aspirasi masyarakat serta demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa.

Sebagai implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Kota Magelang telah menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Bebas KKN serta akuntabel.

Dengan semangat visi pembangunan daerah Kota Magelang "*Magelang sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas yang Dilandasi Masyarakat yang Sejahtera dan Religius*", yang salah satu perwujudannya ditempuh melalui misi kesatu "*Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat*", dan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut diatas, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Inspektorat Kota Magelang telah

melaksanakan pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Paradigma baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

C. Gambaran Umum Organisasi

1. Bidang Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Kota Magelang merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kota Magelang dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Inspektorat Kota Magelang.

2. Core Area

Inspektorat Kota Magelang mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugawan Walikota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi, Inspektorat Kota Magelang didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana pendukung sebagai berikut:

- Inspektorat Kota Magelang didukung oleh 31 (tiga puluh satu) Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

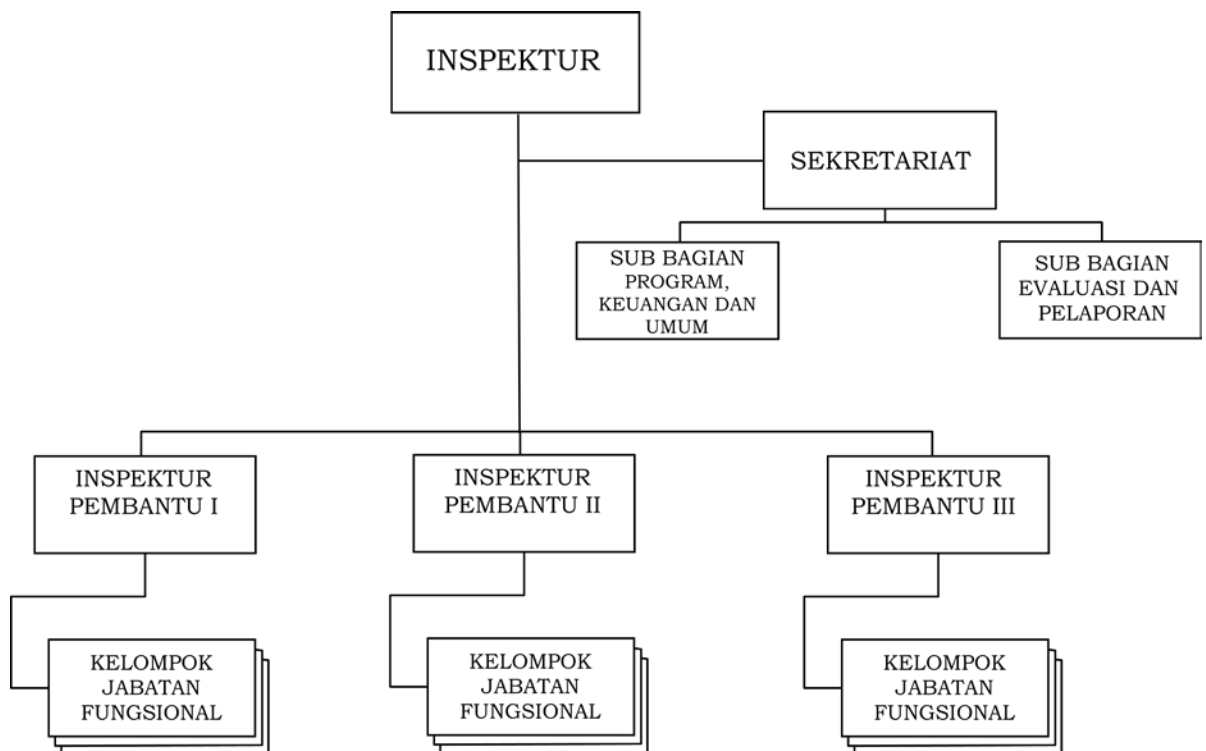
🚩 Pejabat Eselon II	sebanyak 1 orang
🚩 Pejabat Eselon III	sebanyak 4 orang
🚩 Pejabat Eselon IV	sebanyak 2 orang
🚩 Pejabat Fungsional	sebanyak 18 orang
🚩 Staf	sebanyak 5 orang

Komposisi jenjang pendidikan pegawai yang ada di Inspektorat yaitu Magister (S2) sebanyak 7 (tujuh) orang, S1 sebanyak 16 (enam belas) orang, D3 sebanyak 2 (dua) orang, SMA sebanyak 4 (empat) orang dan SMP sebanyak 1 (satu) orang.

- Sarana prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:
 - ✚ Mesin Ketik Elektrik sebanyak 1 (satu) buah
 - ✚ Perangkat Komputer berupa Personal Komputer sebanyak 20 (dua puluh) unit, notebook/laptop sebanyak 13 (tiga belas) unit, printer inkjet/laserjet sebanyak 21 (dua puluh satu) serta scanner sebanyak 1 (satu) unit
 - ✚ LCD Proyektor + screen brite sebanyak 1 set
 - ✚ Wireless sound sebanyak 1 unit
 - ✚ Sarana transportasi berupa kendaraan dinas operasional roda empat sebanyak 5 (lima) unit dan kendaraan roda dua sebanyak 15 (lima belas) unit
 - ✚ Peralatan/perlengkapan kerja berupa meja, kursi dan lain-lain yang cukup tersedia.

3. Susunan Organisasi

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KOTA MAGELANG**



Perda No. 3 tahun 2016

D. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Magelang Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnatansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih awal menyeleraskan visi dan misinya dengan potensi dan kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek guna memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah.

Atas dasar Undang-Undang tersebut Pemerintah Kota Magelang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2016.

Dalam RPJPD dan RPJMD memuat Visi dan Misi yang menjadi acuan bagi semua dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah maupun dokumen perencanaan Satuan kerja Perangkat Daerah Kota Magelang.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Magelang telah ditetapkan rencana menyeluruh dan terpadu yang meliputi penetapan langkah-langkah kegiatan dengan memperhatikan sumber daya serta kondisi lingkungan yang dihadapi guna memberikan kesatuan pandang dalam pelaksanaannya.

Penentuan faktor-faktor keberhasilan Inspektorat Kota Magelang dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yaitu:

- Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dengan memanfaatkan program diklat yang ada;
- Meningkatkan pelayanan sesuai dengan sarana prasarana yang ada;
- Memanfaatkan dana dalam APBD se-efisien dan seefektif mungkin serta mencegah kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN);
- Memanfaatkan potensi aparatur secara profesional untuk meningkatkan kinerja pengawasan;

Merujuk dan faktor-faktor keberhasilan diatas, dengan komitmen untuk meningkatkan kinerja Inspektorat dalam mewujudkan *Good Governance* menuju *Clean Government*, maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

B. Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan gambaran Kota Magelang dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2016-2021.

1. Visi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (*Future*) yang realistik atas cara pandang jauh ke depan kemana instansi atau organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan kondisi masa depan yang dicita-citakan dan merupakan komitmen bersama tanpa ada paksaan.

Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2016-2021 yaitu:

"Magelang sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas yang Dilandasi Masyarakat yang Sejahtera dan Religius".

Makna dari Visi dimaksud adalah:

- 1) Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan dan sektor pendidikan;
- 2) Sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada;

- 3) Dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah.
- 4) Peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi.
- 5) Masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan warga masyarakat.

2. Misi

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah:

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan;
- 3) Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang;
- 5) Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan

peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Dari misi yang telah ditetapkan tersebut Inspektorat Kota Magelang berperan aktif dalam mewujudkan pencapaian misi kesatu dalam pembangunan daerah.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Magelang.

Inspektorat dalam mewujudkan Misi Kesatu dari Visi Pembangunan Kota Magelang, Inspektorat berupaya berperan aktif mendukung dalam pencapaian tujuan "*mewujudkan reformasi birokrasi (tata kelola pemerintahan) dengan aparatur profesional dan berintegritas*" dengan sasaran "*meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif*".

D. Strategi dan Kebijakan

Strategi Inspektorat untuk pencapaian sasaran *meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif*, adalah:

- ✚ Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja pemerintahan yang profesional dan akuntabel sesuai norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur, dengan kebijakan:
 - 1) Pengukuran kinerja pembangunan terintegrasi;
 - 2) Pengendalian manajemen penyerapan anggaran pembangunan;
 - 3) Meningkatkan koordinasi pemahaman tentang SAKIP dan pembinaan kepada seluruh OPD;
 - 4) Melaksanakan Review dan Evaluasi atas LKjIP dan rekomendasi atas hasil review yang dilakukan;
 - 5) Meningkatkan kualitas penyusunan LKjIP disemua SKPD melalui penguatan pemahaman terkait dengan pengukuran kinerja;
 - 6) Mengoptimalkan review dan evaluasi LKjIP dan SAKIP Kota
 - 7) Melakukan Evaluasi terhadap ketercapaian Indikator Kinerja Daerah (IKU) Kota dan SKPD;
 - 8) Meningkatkan kapabilitas APiP;

- 9) Penataan dan implementasi sistem dan prosedur pengawasan keuangan;
- 10) Meningkatkan efektifitas SPIP pada SKPD;
- 11) Optimalisasi peran Aparat Pengawas Internal Instansi Pemerintah serta penguatan Satgas SPIP di SKPD;
- 12) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengembangan zona integritas.









Kebijakan merupakan wujud nyata dari strategi yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu dalam proses organisasi

Dalam penetapan kebijakan *Top Leader* harus mampu memformulasikan kebijakan yang menjadi pedoman, suatu mekanisme tindak lanjut pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga setiap pejabat dan pelaksana dalam organisasi mengetahui adanya dukungan dalam pelaksanaan tugas dan implementasi keputusan.

Perumusan Kebijakan yang dijabarkan dalam nincian program dan kegiatan Inspektorat digambarkan Penjabaran Program dan Kegiatan Tahun 2016 sebagai berikut:

**PENJABARAN
RINCIAN KEGIATAN TAHUN 2016**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan
<p>Mewujudkan reformasi birokrasi (tata kelola pemerintahan) dengan aparatur professional dan berintegritas.</p>	<p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif</p>	<p>Peningkatan kualitas system manajemen kinerja pemerintahan yang professional dan akuntabel sesuai norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja pembangunan terintegrasi 2. Pengendalian manajemen penyerapan anggaran pembangunan 3. Meningkatkan koordinasi pemahaman tentang SAKIP dan pembinaan kepada seluruh OPD 4. Melaksanakan review dan Evaluasi atas LKjIP dan Rekomendasi atas hasil review yang dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengawasan sistem internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Evaluasi LAKIP <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Tindak Lanjut Temuan Pengawasan ✚ Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala ✚ Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Evaluasi LAKIP <ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Review Laporan Keuangan ✚ Inventarisasi Kesesuaian antara Data Belanja, Rincian Belanja pada DPA SKPD dengan Pelaksanaan Anggaran ✚ Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran <ol style="list-style-type: none"> 2. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan
			<p>5. Meningkatkan kualitas penyusunan LKjIP di semua SKPD melalui penguatan pemahaman terkait dengan pengukuran kinerja</p> <p>6. Mengoptimalkan Review dan Evaluasi LKjIP dan SAKIP Kota</p> <p>7. Melakukan Evaluasi Terhadap ketercapaian Indikator Kinerja Daerah (IKU) Kota dan SKPD</p> <p>8. Meningkatkan kapabilitas APIP</p>	<p>Kegiatan:  Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</p> <p>1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</p> <p>Kegiatan:  Evaluasi LAKIP</p> <p>1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</p> <p>Kegiatan:  Evaluasi LAKIP</p> <p>1. Program sinergitas Penerapan SPI pada SKPD</p> <p>Kegiatan:  Inventarisasi Temuan Pengawasan</p> <p>2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</p> <p>Kegiatan:  Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan  Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan</p> <p>1. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</p> <p>Kegiatan:  Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan  Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan
			<p>9. Penataan dan implementasi system dan prosedur pengawasan keuangan</p> <p>10. Meningkatkan efektifitas SPIP pada SKPD</p> <p>11. Optimalisasi peran Aparat Pengawas internal Pemerintah serta penguatan Satgas SPIP di SKPD</p> <p>12. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengembangan Zona Integritas</p>	<p>✦ Pengelolaan Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor</p> <p>✦ Pengembangan Kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah</p> <p>1. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan</p> <p>Kegiatan:</p> <p>✦ Penyusunan kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</p> <p>1. Program Sinergitas Penerapan SPI pada SKPD</p> <p>Kegiatan:</p> <p>✦ Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>✦ Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif</p> <p>1. Program Sinergitas Penerapan SPI pada SKPD</p> <p>Kegiatan:</p> <p>✦ Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>1. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan</p> <p>Kegiatan:</p> <p>✦ Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi</p>

Disamping kegiatan prioritas pencapaian sasaran, strategi, kebijakan umum dan program pembangunan daerah tersebut di atas, Inspektorat Kota Magelang juga mengupayakan dengan kegiatan pendukung dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam indikator program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan:
 - a. Penelitian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - c. Pemantauan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - d. Penyelesaian Kerugian Negara.
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan Rencana Strategis SKPD;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja SKPD.
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan Website.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - d. Penyusunan RKA SKPD;
 - e. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD.
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - f. Penyediaan alat tulis kantor;
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyediaan bahan logistik kantor;
 - j. Penyediaan makanan dan minuman;
 - k. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

E. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2016 mencakup sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dengan mengacu Rencana Strategik.

Susunan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedang program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan semua kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahunan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang meliputi *masukan (input)*, *keluaran (output)*, dan *hasil (outcome)*.

Adapun Ringkasan rencana kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif	1.	Nilai hasil evaluasi LKjIP SKPD	CC
		2.	Penurunan temuan kasus LKPD	3
		3.	Tingkat kapasitas pemahaman tentang SAKIP	0
		4.	Prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil review	75 %
		5.	Prosentase kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	70 %
		6.	Prosentase LKjIP SKPD dengan nilai baik	30 %
		7.	Prosentase LKjIP yang direview LKjIP	25 %
		8.	Prosentase hasil evaluasi SAKIP oleh inspektorat yang ditindaklanjuti	25 %
		9.	Temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan BPK menurun	70%
		10.	Penyelesaian TLHP BPK meningkat	87 %
		11.	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal	85 %
		12.	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	85 %
		13.	Level APIP Kota Magelang menjadi Level 3	Level 2
		14.	Prosentase APIP yang bersertifikat kompetensi meningkat	55 %
		15.	Prosentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat	60 %
		16.	Cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD, satker dan BUMD plus targetnya)	55 %
		17.	Prosentase implementasi SPIP	66 %
		18.	Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil pemeriksaan APIP	85 %
		19.	Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan APIP	70 %
		20.	Prosentase aparat SPIP aktif	55 %
		21.	Prosentase Zona Integritas yang dibentuk	5 %

Sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran, diberikan pernyataan keberhasilan atas kinerja yang ingin diwujudkan pada capaian kinerja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2016.

Pernyataan keberhasilan atas kinerja tersebut diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, yaitu

dengan memberi atribut "melebihi target, mencapai target, dan tidak mencapai target", dengan perincian sebagai berikut:

NO	NILAI CAPAIAN		ATRIBUT
	%	KETERANGAN	
1	> 100	Di atas seratus persen	Melebihi target
2	= 100	Sama dengan seratus persen	Mencapai target
3	< 100	Kurang dari seratus persen	Tidak mencapai target

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan melaksanakan indikator program dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan melalui sistem pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Peran Inspektorat Kota Magelang dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Daerah, diharapkan dapat menjadi lembaga yang strategis dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang diharapkan, pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Magelang.

Adapun pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, dengan cara memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari:

- 1) Data internal, berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya;
- 2) Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Inspektorat Kota Magelang.

➤ **Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Jenis-jenis indikator kinerja yang digunakan adalah;

✚ Indikator masukan (*Input*)

Merupakan alat ukur atas segala sesuatu yang dibutuhkan atau sumber daya yang digunakan dalam rangka melakukan kegiatan tertentu dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia (SDM), informasi dan lain-lain.

✚ Indikator keluaran (*Output*)

Merupakan besaran yang menunjukkan hasil langsung dari suatu kegiatan, dapat berupa fisik maupun non fisik

✚ Indikator hasil (*Outcome*)

Merupakan besaran yang menunjukkan bahwa out put dari kegiatan telah berfungsi secara benar.

Outcome mencerminkan pencapaian tujuan/sasaran yang ditetapkan dalam jangka pendek.

➤ **Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Pengukuran kinerja mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi Pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja atas rencana kinerja Tahun 2016 Inspektorat Kota Magelang diuraikan sebagai berikut:

Misi Kesatu RPJMD Kota Magelang.

“Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi peayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Untuk mencapai Misi Kesatu, Inspektorat Kota Magelang merumuskan 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran, 1 (satu) strategi, 12 (dua belas) kebijakan, 4 (empat) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan.

Nilai Capaian akhir dari masing-masing kebijakan adalah:

NO	SASARAN	KEBIJAKAN	NILAI CAPAIAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif	1. Pengukuran kinerja pembangunan terintegrasi	60,00 %
		2. Pengendalian manajemen penyerapan anggaran pembangunan	20,00 %
		3. Meningkatkan koordinasi pemahaman tentang SAKIP dan pembinaan kepada seluruh OPD	60,00 %
		4. Melaksanakan review dan Evaluasi atas LKjIP dan Rekomendasi atas hasil review yang dilakukan	73,33 %
		5. Meningkatkan kualitas penyusunan LKjIP di semua SKPD melalui penguatan pemahaman terkait dengan pengukuran kinerja	26,08 %
		6. Mengoptimalkan Review dan Evaluasi LKjIP dan SAKIP Kota	26,08 %
		7. Melakukan Evaluasi Terhadap ketercapaian Indikator Kinerja Daerah (IKU) Kota dan SKPD	88,97 %

NO	SASARAN	KEBIJAKAN	NILAI CAPAIAN
		8. Meningkatkan kapabilitas APIP	68,38 %
		9. Penataan dan implementasi sistem dan prosedur pengawasan keuangan	50,00 %
		10. Meningkatkan efektifitas SPIP pada SKPD	61,94 %
		11. Optimalisasi peran Aparat Pengawas internal Pemerintah serta penguatan Satgas SPIP di SKPD	32,60 %
		12. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengembangan Zona Integritas	0,00 %

Evaluasi kinerja dalam rangka mencapai Misi Kesatu pada Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kedua RPJMD Kota Magelang

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif”

Didalam usaha mewujudkan peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas, Inspektorat Kota Magelang mengeluarkan kebijakan:

1) Pengukuran kinerja pembangunan terintegrasi.

Pada Tahun 2016 atas kebijakan tersebut kinerja menunjukkan nilai 60,00 % atau dikategorikan cukup.

Hal tersebut tercermin dari pencapaian indikator kinerja program:

- Nilai hasil evaluasi LKjIP SKPD

Yang didukung dengan capaian kegiatan:

- Kegiatan Evaluasi LAKIP

2) Pengendalian manajemen penyerapan anggaran pembangunan

Pada Tahun 2016 atas kebijakan tersebut kinerja menunjukkan nilai 20,00 % atau dikategorikan kurang.

Hal tersebut tercermin dari pencapaian indikator kinerja program:

- Penurunan temuan kasus LKPD

Yang didukung dengan capaian kegiatan:

- Kegiatan Tindak lanjut Temuan Pengawasan;
- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala;
- Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- 3) Meningkatkan koordinasi pemahaman tentang SAKIP dan pembinaan kepada seluruh OPD

Pada Tahun 2016 atas kebijakan tersebut kinerja menunjukkan nilai 60,00 % atau dikategorikan cukup

Hal tersebut tercermin dari pencapaian indikator kinerja program:

- Tingkat kapasitas pemahaman tentang SAKIP

Yang didukung dengan capaian kegiatan:

- Evaluasi LAKIP;

- 4) Melaksanakan Review dan Evaluasi atas LKjIP dan rekomendasi atas hasil review yang dilakukan

Pada Tahun 2016 atas kebijakan tersebut kinerja menunjukkan nilai 73,33 % atau dikategorikan baik

Hal tersebut tercermin dari pencapaian indikator kinerja program:

- Prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil review
- Prosentase kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Yang didukung dengan capaian kegiatan:

- Kegiatan Review Laporan keuangan
- Kegiatan Inventarisasi Kesesuaian antara Data Belanja, Rincian Belanja pada DPA SKPD dengan Pelaksanaan Anggaran
- Kegiatan Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

- 5) Meningkatkan kualitas penyusunan LKjIP di semua SKPD melalui penguatan pemahaman terkait dengan pengukuran kinerja

Pada Tahun 2016 atas kebijakan tersebut kinerja menunjukkan nilai 26,08 % atau dikategorikan kurang

Hal tersebut tercermin dari pencapaian indikator kinerja program:

- Prosentase LKjIP SKPD dengan nilai baik

Yang didukung dengan capaian kegiatan:

- Kegiatan Evaluasi LAKIP

6) Mengoptimalkan Review dan Evaluasi LKjIP dan SAKIP Kota

Pada tahun 2016 atas kebijakan tersebut kinerja menunjukkan nilai 26,08 % atau dikategorikan kurang

Hal tersebut tercermin dari pencapaian indikator kinerja program:

- Prosentase SKPD yang direview LKJ IP
- Prosentase hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti

Yang didukung dengan capaian kegiatan:

- Kegiatan Evaluasi LAKIP

7) Melakukan Evaluasi terhadap ketercapaian Indikator Kinerja Daerah (IKU) Kota dan SKPD

Pada Tahun 2016 atas kebijakan tersebut kinerja menunjukkan nilai 88,97 % atau dikategorikan sangat baik

Hal tersebut tercermin dari pencapaian indikator kinerja program:

- Temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan BPK menurun
- Penyelesaian TLHP BPK meningkat
- Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal
- Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK

Yang didukung dengan capaian kegiatan:

- Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan
- Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

8) Meningkatkan kapabilitas APIP

Pada Tahun 2016 atas kebijakan tersebut kinerja menunjukkan nilai 68,38 % atau dikategorikan baik

Hal tersebut tercermin dari pencapaian indikator kinerja program:

- Level APIP Kota Magelang menjadi level 3
- Prosentase APIP yang bersertifikat kompetensi meningkat
- Prosentase APIP yang bersertifikat penunjang meningkat

Yang didukung dengan capaian kegiatan:

- Kegiatan Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
- Kegiatan Pengelolaan Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor
- Pengembangan Kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- 9) Penataan dan implementasi sistem dan prosedur pengawasan keuangan
Pada Tahun 2016 atas kebijakan tersebut kinerja menunjukkan nilai 50,00 % atau dikategorikan cukup
Hal tersebut tercermin dari pencapaian indikator kinerja program:
- Cakupan pemeriksaan (diperinci dari obrik SKPD, satker dan BUMD plus targetnya)
Yang didukung dengan capaian kegiatan:
- Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 10) Meningkatkan efektifitas SPIP pada SKPD
Pada Tahun 2016 atas kebijakan tersebut kinerja menunjukkan nilai 61,94 % atau dikategorikan cukup
Hal tersebut tercermin dari pencapaian indikator kinerja program:
- Prosentase implementasi SPIP
- Penurunan temuan administrasi (SPI) hasil pemeriksaan APIP
- Penurunan temuan ketidakpatuhan UU hasil pemeriksaan APIP
Yang didukung dengan capaian kegiatan:
- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
- 11) Optimalisasi peran Aparat Pengawas Internal Instansi Pemerintah serta penguatan Satgas SPIP di SKPD
Pada Tahun 2016 atas kebijakan tersebut kinerja menunjukkan nilai 32,60 % atau dikategorikan kurang
Hal tersebut tercermin dari pencapaian indikator kinerja program:
- Prosentase Aparat SPIP aktif
Yang didukung dengan capaian kegiatan:
- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 12) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengembangan Zona Integritas
Pada Tahun 2016 atas kebijakan tersebut kinerja menunjukkan nilai 0,00 % atau dikategorikan sangat kurang
Hal tersebut tercermin dari pencapaian indikator kinerja program:
- Prosentase Zona Integritas yang dibentuk
Yang didukung dengan capaian kegiatan:
- Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

C. Akuntabilitas Keuangan

Aspek keuangan sebagai unsur penunjang pelaksanaan kegiatan rutin Inspektorat Kota Magelang Tahun Anggaran 2016.

Adapun perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Inspektorat Kota Magelang Tahun 2016 adalah sebagai berikut::

**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Inspektorat Kota Magelang Tahun Anggaran 2016**

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)	%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas/Operasional	2.625.000,-	2.624.805,-	99,99
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000,-	2.136.394,-	71,21
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7.700.000,-	3.923.000,-	50,95
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	56.006.000,-	54.483.100,-	97,28
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.000.000,-	1.970.965,-	98,55
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3.778.000,-	3.778.000,-	100,00
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.600.000,-	5.441.875,-	97,18
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.180.000,-	5.775.000,-	93,45
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	840.000,-	840.000,-	100,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	44.891.000,-	33.509.655,-	74,65
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	152.560.000,-	145.960.015,-	95,67
12	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	83.159.000,-	80.058.000,-	96,27
13	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	11.032.000,-	10.988.000,-	99,60

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)	%
14	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	166.521.000,-	158.856.600,-	95,40
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.590.000,-	10.590.000,-	100,00
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	165.923.000,-	113.093.624,-	68,16
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	22.565.000,-	11.013.400,-	48,81
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.327.000,-	3.375.650,-	40,54
19	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.663.000,-	463.000,-	27,84
20	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.962.000,-	1.962.000,-	100,00
21	Penyusunan RKA SKPD	10.000.000,-	5.712.200,-	57,12
22	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) SKPD	2.982.000,-	2.975.050,-	99,77
23	Penelolaan Website	12.800.000,-	10.378.500,-	81,08
24	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	330.550.000,-	278.866.410,-	84,36
25	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang	175.437.000,-	104.078.550,-	59,33
26	Inventarisasi Temuan Pengawasan	50.268.000,-	46.521.500	92,55
27	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	183.044.000,-	160.452.300,-	87,66
28	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	75.851.000,-	67.115.750,-	88,48
29	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	33.283.000,-	32.059.500,-	96,32
30	Evaluasi LAKIP	40.247.000,-	31.322.000,-	77,82
31	Review Laporan Keuangan	44.602.000,-	37.962.500,-	85,11
32	Penelitian LP2P	31.032.000,-	24.401.000,-	78,63
33	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi	57.305.000,-	51.742.088,-	90,29

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)	%
	Birokrasi			
34	Penyelenggaraan SPIP	63.933.000,-	49.126.700,-	76,84
35	Pelaksanaan Quality Assurance Pengawasan	57.651.000,-	53.220.300,-	92,31
36	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	22.068.000,-	22.006.000,-	99,72
37	Pemantauan LHKASN	28.474.000,-	25.392.700,-	89,18
38	Penyelesaian Kerugian Negara	236.898.000,-	201.493.500,-	85,05
39	Inventarisasi Kesesuaian antara Data Belanja, Rincian Belanja pada DPA SKPD dengan Pelaksanaan Kegiatan	28.020.000,-	24.700.000,-	88,15
40	Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	27.934.000,-	21.548.500,-	77,14
41	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	9.705.000,-	1.950.000,-	20,09
42	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3.750.000,-	3.748.200,-	99,95
43	Pengelolaan Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor	43.986.000,-	32.547.750,-	74,00
44	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	39.138.000,-	23.524.750,-	80,11
45	Pengembangan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	60.100.000,-	54.783.550,-	91,15
46	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	11.151.000,-	10.670.000,-	95,69
	Jumlah	2.437.131.000,-	2.029.142.381,-	83,26

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Inspektorat Kota Magelang pada Tahun 2016 mendapat nilai 47,28 dikategorikan Kurang Baik.

Nilai capaian tersebut diperoleh dari perhitungan pencapaian misi sebagai berikut:

Nilai Capaian Kinerja Misi Tahun 2016

KEBIJAKAN		NILAI CAPAIAN SASARAN (%)
1.	Misi Pertama: Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	47,28
Nilai Capaian Kinerja		47,28 %

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Peningkatan efektifitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat untuk mendukung terwujudnya aparatur yang bersih dan baik serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

C. Strategi Pemecahan Masalah dan Langkah Antisipatif

Meningkatkan sarana dan prasarana kelancaran tugas dan meningkatkan kualitas SDM aparat pengawasan yang professional, kredibel, responsif dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat untuk mendukung terwujudnya aparatur yang bersih dan baik serta bebas KKN.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Magelang Tahun 2016 disamping sebagai media akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja sekaligus sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan serta bagi pihak-pihak yang terkait; serta sebagai media pembelajaran yang bersifat terus menerus untuk peningkatan kinerja melalui pengukuran sasaran dan indikator-indikatornya yang dikaji secara realistik.

Dengan Laporan Kinerja ini, dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Inspektorat Kota Magelang, penyempurnaan-penyempurnaan yang perlu dilakukan, gambaran tentang keselarasan dan keterkaitan antar dokumen-dokumen yang dihasilkan pada setiap tahapan sistem tersebut.

Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Inspektorat Kota Magelang.

Magelang,

INSPEKTUR KOTA MAGELANG

Drs. DJATMO WAHYUDI

Pembina Utama Muda

NIP. 19581115 198503 1 014

LAMPIRAN

2016

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)

Inspektorat Kota Magelang

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA MAGELANG
TAHUN 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Cara Mencapai Tujuan/Sasaran	
			Kebijakan	Program/Kegiatan
Mewujudkan reformasi birokrasi (tata kelola pemerintahan) dengan aparatur profesional dan berintegritas.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif	Peningkatan kualitas system manajemen kinerja pemerintahan yang professional dan akuntabel sesuai norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	Pengukuran kinerja pembangunan terintegrasi	Program pengawasan sistem internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			Pengendalian manajemen penyerapan anggaran pembangunan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			Meningkatkan koordinasi pemahaman tentang SAKIP dan pembinaan kepada seluruh OPD	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
			Melaksanakan review dan Evaluasi atas LKjIP dan Rekomendasi atas hasil review yang dilakukan	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
			Meningkatkan kualitas penyusunan LKjIP di semua SKPD melalui penguatan pemahaman terkait dengan pengukuran kinerja	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
			Mengoptimalkan Review dan Evaluasi LKjIP dan SAKIP Kota	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
			Melakukan Evaluasi Terhadap ketercapaian Indikator Kinerja Daerah (IKU) Kota dan SKPD	Program sinergitas Penerapan SPI pada SKPD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Cara Mencapai Tujuan/Sasaran	
			Kebijakan	Program/Kegiatan
			Meningkatkan kapabilitas APIP	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
			Penataan dan implementasi system dan prosedur pengawasan keuangan	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
			Meningkatkan efektifitas SPIP pada SKPD	Program sinergitas Penerapan SPI pada SKPD
			Optimalisasi peran Aparat Pengawas internal Pemerintah serta penguatan Satgas SPIP di SKPD	Program sinergitas Penerapan SPI pada SKPD
			Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengembangan Zona Integritas	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Magelang,
INSPEKTUR KOTA MAGELANG

Drs. DJATMO WAHYUDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19581115 198503 1 014



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. DJATMO WAHYUDI

Jabatan : INSPEKTUR KOTA MAGELANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. SIGIT WIDYONINDITO, M.T.

Jabatan : WALIKOTA MAGELANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Magelang, November 2016

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ttd

ttd

Ir. SIGIT WIDYONINDITO, M.T.

Drs. DJATMO WAHYUDI

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT KOTA MAGELANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas	a. Jumlah Surat Menyurat b. Jumlah Tagihan Telepon c. Jumlah Pajak Kendaraan Dinas d. Jumlah Biaya Honor Pengelola Keuangan e. Jumlah Peralatan Kebersihan f. Jumlah ATK Rutin g. Jumlah Cetakan & Penggandaan h. Jumlah Surat Kabar & Buku Ilmu Pengetahuan Umum i. Jumlah Pengisian Tabung Gas j. Jumlah Jamuan Makan dan Minum k. Jumlah Perjalanan Dinas l. Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua m. Jumlah Pengadaan Paper Shredder, Meja Komputer dan Kursi Putar n. Jumlah Pengadaan Komputer PC, Laptop, Printer dan UPS o. Jumlah Pengadaan Tanaman Hias p. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara q. Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara r. Pengelolaan Sarana Publikasi	800 surat 12 bulan 16 unit 12 bulan 15 jenis 14 jenis 3 jenis 18 jenis 6 kali 37 kegiatan 15 kegiatan 4 unit 6 unit 26 unit 30 jenis 16 unit 42 unit 12 bulan
2	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan	a. Jumlah Laporan Capaian Kinerja b. Jumlah Laporan Prognosis c. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun d. Jumlah RKA dan RKPA SKPD e. Jumlah Buku LAKIP SKPD f. Jumlah Buku Renstra SKPD g. Jumlah Laporan Renja SKPD	4 laporan 1 bendel 1 buku 2 dokumen 1 buku 1 dokumen 2 dokumen
3	Terwujudnya peningkatan kualitas aparat pengawasan	a. Jumlah Laporan Angka Kredit PFA/P2UPD b. Jumlah Peserta Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Aparat Pengawasan c. Jumlah Workshop/Lokakarya Peningkatan Kompetensi APIP	16 laporan 30 peserta 1 kegiatan
4	Terwujudnya aparat yang disiplin, bersih dan berwibawa	a. Jumlah LHP Kasus/Khusus	18 obrik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
5	Terwujudnya tertib administrasi di semua unit kerja	a. Jumlah LHP Reguler b. Jumlah Lap. Evaluasi LAKIP c. Jumlah Lap. Review LKD d. Jumlah Lap. Pajak-Pajak Pribadi e. Jumlah Lap. Penilaian SKPD Pelayanan Publik & Lap. Reformasi Birokrasi f. Sosialisasi Diagnostic Assesment Penerapan SPIP g. Aktualisasi dan Sinkronisasi Laporan Keuangan/Neraca SKPD h. Jumlah Lap Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi i. Jumlah Lap. Hasil Pemantauan & Monitoring LHKASN j. Jumlah Lap. Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara k. Jumlah Lap. Hasil Reviu DPA 2016 dan DPPA 2016 l. Jumlah Lap. Hasil Reviu RPJMD dan RKA 2017 m. Jumlah Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan	95 obrik 2 kegiatan 2 kegiatan 3200 laporan 3 buku 2 kegiatan 12 laporan 2 kegiatan 560 orang 6 laporan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 laporan
6	Terwujudnya peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	a. Jumlah Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan BPK dan Inspektorat Provinsi Jateng b. Jumlah Data Pendukung Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Kota, Inspektorat Provinsi dan <i>pending</i> BPK c. Jumlah Sinkronisasi Tindak Lanjut Pemeriksaan d. Jumlah Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan	4 kegiatan 100 TL 4 kegiatan 1 kegiatan

Program		Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 285.180.000,-	APBD-P
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 459.790.000,-	APBD-P
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Rp. 24.934.000,-	APBD-P
4	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Rp. 12.800.000,-	APBD-P
5	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 1.486.597.000,-	APBD-P
6	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 13.455.000,-	APBD-P
7	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 143.224.000,-	APBD-P
8	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Penawasan	Rp. 11.151.000,-	APBD-P

Magelang, November 2016

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ttd

ttd

Ir. SIGIT WIDYONINDITO, M.T.

Drs. DJATMO WAHYUDI

**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2016**

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	INSPEKTORAT	2,437,131,000	2,029,142,381							
1.20.1.20.30.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	285,180,000	260,442,809							
1.20.1.20.30.01.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,625,000	2,624,805							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah surat dinas yang dapat diselesaikan			800	1,114	Surat				
	Hasil (Outcome)									
	Tertib Pengelolaan Administrasi Surat Menyurat Dinas						100	100	%	
1.20.1.20.30.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listiik	3,000,000	2,136,394							
	Keluaran (Output):									
	Biaya Langganan Telepon			12	12	Bulan				
	Hasil (Outcome)									
	Terpenuhinya Biaya Langganan Telepon Kantor						100	100	%	
1.20.1.20.30.01.06	Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7,700,000	3,923,000							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas			16	16	Unit				
	Hasil (Outcome)									
	Terpenuhinya biaya perpanjangan pajak kendaraan dinas						100	100	%	
1.20.1.20.30.01.07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	56,006,000	54,483,100							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah honorarium pengelola keuangan SKPD			12	12	Bulan				
	Hasil (Outcome)									
	Tertib pengelolaan administrasi keuangan SKPD						100	100	%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1.20.1.20.30.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2,000,000	1,970,965							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah Pengadaan Sarana Kebersihan Kantor			15	15	Jenis				
	Hasil (Outcome)									
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebersihan Kantor						100	100	%	
1.20.1.20.30.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor	3,778,000	3,778,000							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor			14	14	Jenis				
	Hasil (Outcome)									
	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor						100	100	%	
1.20.1.20.30.01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,600,000	5,441,875							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan			3	3	Jenis				
	Hasil (Outcome)									
	Tersedianya barang cetak dan penggandaan						100	100	%	
1.20.1.20.30.01.15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,180,000	5,775,000							
	Keluaran (Output):									
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Ilmu Pengetahuan Umum			18	17	Jenis				
	Hasil (Outcome):									
	Meningkatnya pengetahuan aparat pengawasan						100	100	%	
1.20.1.20.30.01.16	Kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	840,000	840,000							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah Pengisian Tabung Gas			6	6	Kali				
	Hasil (Outcome):									
	Tersedianya Gas LPG						100	100	%	
1.20.1.20.30.01.17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	44,891,000	33,509,655							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah Jamuan Makan dan minum untuk pegawai, rapat dan tamu			37	37	Keg				
	Hasil (Outcome):									
	Peningkatan Kelancaran pelaksanaan tugas						100	100	%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1.20.1.20.30.01.18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	152,560,000	145,960,015							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah			15	15	Keg				
	Hasil (Outcome):									
	Peningkatan Kinerja SKPD						100	100	%	
1.20.1.20.30.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	459,790,000	384,599,624							
1.20.1.20.30.02.05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	83,159,000	80,058,000							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua			4	4	Unit				
	Hasil (Outcome):									
	Peningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas						100	100	%	
1.20.1.20.30.02.07	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	11,032,000	10,986,000							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah Pengadaan Alat penghansur Kertas, meja Komputer dan Kursi Putar			6	6	Unit				
	Hasil (Outcome):									
	Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas						100	100	%	
1.20.1.20.30.02.09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	166,521,000	158,856,600							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah Pengadaan Komputer PC, Laptop, Printer dan UPS			26	26	Unit				
	Hasil (Outcome):									
	Tersedianya sarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas						100	100	%	
1.20.1.20.30.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10,590,000	10,590,000							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah pengadaan tanaman Has dan perlengkapannya			30	30	Jenis				
	Hasil (Outcome):									
	Terciptanya kenyamanan dan keindahan ruangan kantor						100	100	%	
1.20.1.20.30.02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	165,923,000	113,093,624							

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
	Keluaran (Output):									
	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional			16	16	Unit				
	Hasil (Outcome):									
	Terpeliharanya kendaraan dhnasloperasional						100	100	%	
1.20.1.20.30.02.26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	22,565,000	11,013,400							
	Keluaran (Output):									
	Terpeliharanya peralatan kantor, terdiri dari:			42	21	Unit				
	- Personal komputer									
	- Notebook									
	- Printer Deskjet									
	- Mesin Kebk Manual									
	- Air Conditioner									
	Hasil (Outcome):									
	Terpeliharanya peralatan kantor						100	100	%	
1.20.1.20.36.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24,934,000	14,487,900							
1.20.1.20.30.06.01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,327,000	3,375,650							
	Keluaran (Output)									
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4	4	Laporan				
	Hasil (Outcome):									
	Evaluasi dan Pengukuran kinerja						100	100	%	
1.20.1.20.30.06.03	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1,663,000	463,000							
	Keluaran (Output)									
	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran			1	1	Bendel				
	Hasil (Outcome):									
	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Administrasi Anggaran dan Keuangan						100	100	%	
1.20.1.20.30.06.04	Kegiatan Periyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,962,000	1,962,000							
	Keluaran (Output):									
	JumlahLaporan keuangan SKPD			1	1	Buku				

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
	Hasil (Outcome):									
	Terlaksananya-peningkatan kinerja pengelolaan keuangan						100	100	%	
1.20.1.20.30.06.08	Kegiatan Penyusunan RKA SKPD	10,000,000	5,712,200							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah RKA dan RKPA SKPD			2	2	Dok				
	Hasil (Outcome):									
	Terlaksananya tertib pengelolaan perencanaan anggaran SKPD						100	100	%	
1.20.1.20.30.06.27	Kegiatan Penyusunan Penyusunan LKJ IP SKPD	2,982,000	2,975,050							
	Keluaran (Output):									
	Tersusunya Buku LKJ IP SKPD			1	1	Buku				
	Hasil (Outcome):									
	Terlaksananya peningkatan kineila SKPD						100	100	%	
1.20.1.20.30.15	Program Pengembangan Komunikasi, Intormasi & Media Massa	12,800,000	10,378,500							
1.20.1.20.30.06.19	Kegiatan Pengelolaan Website	12,800,000	10,378,500							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah Pengelolaan sarana publikasi			12	12	Bulan				
	Hasil (Outcome):									
	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja SKPD						100	100	%	
1.20.1.20.30.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,486,597,000	1,232,609,298							
1.20.1.20.30.20.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	330,550,000	278,866,410							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah Obyek Pemeriksaan			95	86	Obrik				
	Hasil (Outcome):									
	Meningkatnya kinerja unit kerja yang diperiksa						100	100	%	
1.20.1.20.30.20.02	Kegiatan Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	175,437,000	104,078,550							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah Obyek Pemeriksaan Kasus/Khusus			18	23	Obrik				

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
	Terlaksananya Pengendalian dan pencegahan tindakan yang menjurus korupsi						100	100	%	
1.20.1.20.30.20.24	Kegiatan Pemantauan LHKASN	28,474,000	25,392,700							
	Keluaran (Output):									
	Laporan hasil pemantauan LHKPN dan monitoring LHKASN			512	442	Keg				
	Hasil (Outcome):									
	Peningkatan Tertib Administrasi Laporan Harta Kerkaraan Pejabat Eselon III IV, V dan pejabat Fungsional						100	100	%	
1.20.1.20.30.20.25	Kegiatan Penyelesaian Kerugian Negara	236,898,000	201,493,500							
	Keluaran (Output):									
	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gant Rugi (TP-TR)			6	6	Lap				
	Hasil (Outcome):									
	Proses Penyelesaian Piutang Kerugian Negara						100	100	%	
1.20.1.20.30.20.26	Kegiatan Inventarisasi Kesesuaian antara Data Belanja, Rincian Belanja pada DPA SKPD dgn Pelaks. Kegiatan	28,020,000	24,700,000							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah laporan Reviu DPA dan DPPA SKPD			2	2	Keg				
	Hasil (Outcome):									
	Terlaksananya data sinkronisasi belanja Aset Pemerintah Kota Magelang						100	100	%	
1.20.1.20.30.20.33	Kegiatan Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	27,934,000	21,548,500							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah Hasil Reviu RPJMD dan RKA			2	2	Keg				
	Hasil (Outcome):									
	Terlaksananya Reviu RPJMD dan RKA 2017						100	100	%	
1.20.1.20.30.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	13,455,000	5,698,200							
1.20.1.20.30.21.54	Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD	9,705,000	1,950,000							
	Keluaran (Output):									
	Tersusunya Renstra SKPD			1	1	Dok				
	Hasil (Outcome):									
	Terlaksananya tertib pengelolaan perencanaan SKPD						100	100	%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1.20.1.20.30.21.55	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD	3,750,000	3,748,200							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah Laporan Rencana Kerja (Renja) SKPD			2	2	Dok				
	Hasil (Outcome):									
	Terlaksananya peningkatan kinerja dan tertib pengelolaan perencanaan SKPD						100	100	%	
1.20.1.20.30.21	Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemenksa	143,224,000	110,856,050				- ----	-	-	--
1.20.20.30.20.03	Pengelolaan angka kredit pejabat fungsional auditor	43,986,000	32,547,750							
	Keluaran (Output):									
	Laporan Laporan Angka Kredit Auditor dan P2UPD			16	16	Lap				
	Hasil (Outcome):									
	Peningkatan Kinerja PAdan P2UPD						100	100	%	
1.20.1.20.30.21.06	Kegiatan Pengelolaan Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	39,138,000	23,524,750							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah Peserta Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)			30	30	peserta				
	Hasil (Outcome):									
	Peningkatan SOM Aparat Pengawasan						100	100	%	
1.20.120.30.21.07	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah	60,100,000	54,783,550							
	Keluaran (Output):									
	Jumlah Workshop Peningkatan Kompetensi APIP			1	1	Keg				
	Hasil (Outcome):									
	Peningkatan Sinergitas APIP dalam menunjang penerapan sistem accrual basic						100	100	%	
1.20.1.20.30.21	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	11,151,000	10,670,000							
1.20.1.20.30.22.02	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan	11,151,000	10,670,000							

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
	Keluaran (Output):									
	Tersusunnya Sistem dan prosedur Pengawasan			2	2	Laporan				
	Hasil (Outcome):									
	Tertib Manajemen Pemeriksaan						100	100	%	

Magelang,
INSPEKTUR KOTA MAGELANG

Drs. DJATMO WAHYUDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19581115 198503 1 014